

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 di acara *Sindo Weekly Government Award*, Dharmasraya memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Pemekaran terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari beragam faktor, salah satunya merujuk kepada laporan Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011 yang menempatkan Kabupaten Dharmasraya pada posisi teratas sebagai kabupaten pemekaran terbaik hasil evaluasi daerah otonom.¹

Dalam laporan hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011 tersebut Kabupaten Dharmasraya menduduki posisi nomor satu dalam perolehan skor evaluasi daerah otonom dengan indikator, faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, ketersediaan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Dharmasraya menduduki peringkat satu dengan perolehan skor sebesar 59,43 dari skor keseluruhan.²

Penghargaan sebagai kabupaten pemekaran terbaik diperoleh Kabupaten Dharmasraya saat berada dibawah kepemimpinan Adi Gunawan. Selain penghargaan sebagai kabupaten pemekaran terbaik, dibawah kepemimpinan Adi Gunawan Kabupaten Dharmasraya juga meraih beragam capaian seperti

¹ Jefri Hidayat, "Dharmasraya Raih Kabupaten Pemekaran Terbaik Nasional", diakses dari <http://www.kompasiana.com/www.jefrihidayat.com/54f7fbc3a33311ae608b47db/dharmasraya-raih-kabupaten-terbaik-nasional>, pada 13 juli 2018 pukul 13.33 wib

²*Ibid.*

penghargaan Presiden RI, perihal peningkatan produksi beras nasional tahun 2010 dan 2011, Penghargaan Koperasi Terbaik Nasional tahun 2011,2012 dan 2013, dan Penghargaan terbaik nasional penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dari Presiden RI tahun 2015.³

Peningkatan kinerja yang baik yang dilakukan oleh Adi Gunawan sebagai Bupati diganjar dengan memperoleh beberapa penghargaan seperti 10 tokoh terbaik sumbar versi Perhimpunan Media Sumatra Barat tahun 2011, Citra Abdi Negara oleh Pemprov Sumbar tahun 2011, Satyalencana Bakti Koperasi oleh Menkop UKM 2013 dan Satyalencana pembangunan dari Presiden RI tahun 2014.⁴

Beragam perolehan penghargaan didapatkan oleh Kabupaten Dharmasraya selama dibawah kepemimpinan Adi Gunawan. Selepas lima tahun menjabat sebagai bupati dan memperoleh berbagai macam penghargaan akan menjadi hal wajar bagi Adi Gunawan untuk ikut serta kembali menjadi kontestan sebagai calon bupati pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 dengan harapan untuk dapat kembali melanjutkan kepemimpinannya selama satu periode lagi.

Hasil dari pilkada 2015 ternyata berbeda antara harapan dan realita yang didapati oleh Adi Gunawan. Secara mengejutkan pada Pilkada Dharmasraya pada tahun 2015 tersebut Adi Gunawan yang saat itu berpasangan dengan Jonson Putra kalah telak dalam perolehan suara dari pasangan Sutan Riska dan Amrizal. Kekalahan yang dialami oleh Adi Gunawan diperoleh dengan selisih jumlah suara

³ Riwayat Hidup Calon Bupati, *Penghargaan Adi Gunawan*, KPU Dharmasraya 2015

⁴ *Ibid.*

yang cukup besar yakni mencapai 26.475 atau 27,18 % dari jumlah suara keseluruhan.

Pilkada Dharmasraya pada tahun 2015, hanya mempertemukan dua kandidat calon Bupati yakni antara Adi Gunawan dan Sutan Riska. Adi Gunawan berpasangan dengan Jonson Putra diusung oleh Golkar, Nasdem dan Demokrat sedangkan pasangan Sutan Riska dan Amrizal diusung oleh PDIP, PAN, dan Hanura.⁵

Adi Gunawan dikalahkan oleh Sutan Riska, politisi yang tergolong baru memulai berkiprahnya di dalam dunia politik di Kabupaten Dharmasraya. Dalam perolehan suara secara keseluruhan Adi Gunawan dan Jonson Putra hanya mendapat persentase suara sebesar 36,41 % dengan jumlah suara sebesar 35.410 sedangkan pasangan Sutan Riska dan Amrizal meraih persentase suara sebesar 63,59 % dengan jumlah suara 61.885.⁶

Ada hal yang unik dari kekalahan yang dialami oleh Adi Gunawan pada pilkada 2015. Beragam penghargaan yang diterima oleh Adi Gunawan selama ia menjabat sebagai bupati ternyata tidak serta-merta membuat Adi Gunawan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat Dharmasraya untuk memilihnya kembali menjadi Bupati. Kekalahan Adi Gunawan pada Pilkada 2015 menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas lebih dalam untuk dapat mengetahui mengenai bagaimana sosok Adi Gunawan yang saat itu menjadi kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana kepemimpinannya selama menjadi bupati pada periode 2010-2015. Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka penulis

⁵ Laporan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015 Kabupaten Dharmasraya, Arsip KPU Kabupaten Dharmasraya.

⁶ Ibid.

merasa tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul **“Kepemimpinan Adi Gunawan Sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Kabupaten Dharmasraya dibawah kepemimpinan Adi Gunawan memperoleh berbagai macam penghargaan. Namun beragam penghargaan yang dicapai oleh Adi Gunawan selama menjabat sebagai bupati ternyata tidak membuat Adi Gunawan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat Dharmasraya untuk memilihnya kembali menjadi Bupati. Jika pada umumnya keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerah akan membuatnya memiliki kesempatan lebih besar untuk terpilih kembali agar dapat melanjutkan kepemimpinannya kembali namun hal tersebut berbeda dengan apa yang dialami oleh Adi Gunawan. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk menulis lebih lanjut mengenai bagaimana sosok Adi Gunawan, seperti apa kepemimpinannya, dan mengapa Adi Gunawan kalah dalam pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.

Pada dasarnya penulisan ini berbentuk biografi dengan fokus penelitian tentang kepemimpinan Adi Gunawan selama menjabat sebagai Bupati Dharmasraya. Untuk mempertajam tulisan ini maka dibutuhkan piranti pembatasan masalah. Penulisan sejarah akan lebih mudah dan terarah jika dilengkapi dengan perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial. Hal itu sangat diperlukan, karena dengan batasan tersebut sejarawan dapat terhindar dari

hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis. Jika piranti ini tidak digunakan, akibatnya analisis yang dihasilkan bersifat lemah.⁷

Batasan temporal dari tulisan ini adalah 2010-2015. Tahun 2010 menjadi batasan awal dikarenakan pada tahun ini Adi Gunawan dilantik sebagai Bupati Dharmasraya. Batasan akhir penulisan ini adalah tahun 2015, karena pada tahun inilah masa jabatan Adi Gunawan sebagai Bupati berakhir. Batas spasialnya dari penulisan ini adalah Kabupaten Dharmasraya karena disinilah Adi Gunawan menjabat sebagai Bupati.

Untuk lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian maka batasan permasalahan yang akan dibahas dibatasi melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Adi Gunawan?
2. Bagaimana kepemimpinan Adi Gunawan saat menjadi bupati?
3. Mengapa Adi Gunawan kalah dalam pilkada 2015?

C. Tujuan Penelitian

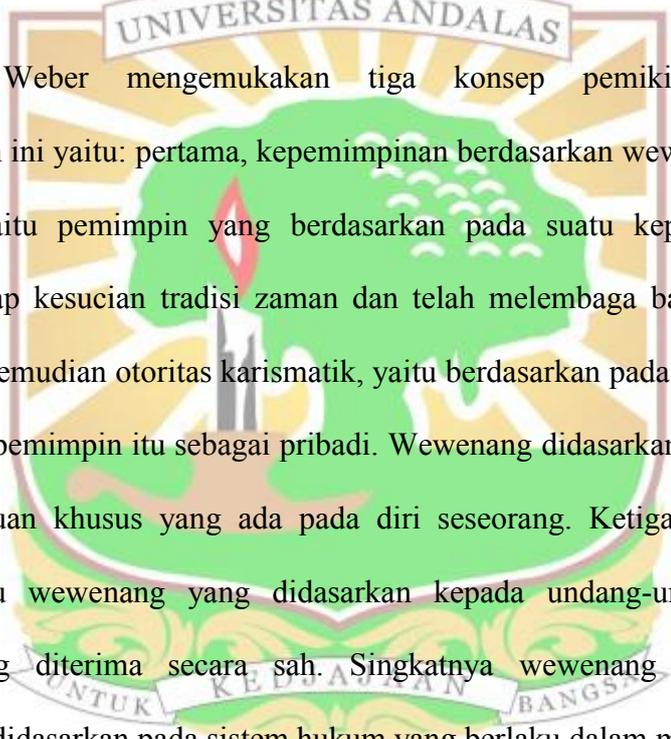
Penulisan mengenai kepemimpinan Adi Gunawan sebagai Bupati Dharmasraya ini bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Adi Gunawan saat menjabat sebagai bupati. Secara spesifik tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan:

1. Latarbelakang kehidupan Adi Gunawan.
2. Kepemimpinan Adi Gunawan saat menjadi bupati.
3. Kekalahan Adi Gunawan dalam pilkada 2015.

⁷ Taufik Abdullah, Abdurrahman Surjomihardjo, ed. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Prespektif* (Jakarta : Gramedia, 1985), hal.xii.

D. Kerangka Analisis

Kepemimpinan adalah masalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi sosial diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin. Kepemimpinan ini bisa berfungsi sebagai kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan tertentu.⁸



Max Weber mengemukakan tiga konsep pemikiran mengenai kepemimpinan ini yaitu: pertama, kepemimpinan berdasarkan wewenang (otoritas) tradisional, yaitu pemimpin yang berdasarkan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi zaman dan telah melembaga bahkan menjiwai masyarakat. Kemudian otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai pribadi. Wewenang didasarkan pada kharisma atau kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Ketiga otoritas legal-rasional, yaitu wewenang yang didasarkan kepada undang-undang menurut prosedur yang diterima secara sah. Singkatnya wewenang yang diterima pemimpin itu didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁹

Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antar manusia yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin.¹⁰

⁸ Kartono dan Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta:PT Raja Grafindo,2006), hlm.5-6

⁹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm.116..

¹⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.2

Kepemimpinan itu bisa saja difokuskan pada satu individu.¹¹ Dalam penulisan mengenai kepemimpinan ini dikaitkan pada figur Adi Gunawan sebagai Bupati Dharmasraya. Selain itu penelitian ini berkaitan dengan studi biografi yang memusatkan perhatian terhadap aktivitas kepemimpinan seorang tokoh.

Penulisan biografi merupakan suatu usaha untuk menggambarkan atau memperkenalkan seseorang melalui kisah hidupnya. Biografi adalah suatu bentuk penulisan yang berusaha mengungkapkan aktifitas seseorang dalam waktu tertentu, tanpa mengabaikan hubungan tokoh tersebut dengan perkembangan zaman dan lingkungannya.¹² Dalam pembagiannya biografi dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: berdasarkan susunan dan waktu (kronologis), berdasarkan susunan urutan topik (tematis) dan didasarkan pada kombinasi keduanya (komprehensif).¹³

Berdasarkan paparan konsep diatas, tulisan ini tergolong pada penulisan biografi tematis mengenai kepemimpinan Adi Gunawan selama menjadi bupati tahun 2010-2015 di Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari konsep wewenang yang dikemukakan Weber, kepemimpinan yang dimiliki oleh Adi Gunawan adalah otoritas legal-rasional. Hal itu dapat dilihat dari kepemimpinan yang ia peroleh melalui kemenangannya pada pemilihan kepala daerah tahun 2010. Menjadikannya sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan yakni kepemimpinan

¹¹ Kuper Adam, *Ensikopedi Ilmu-ilmu Sosial/Penterjemah Haris Munandar* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000)

¹² Taufik Abdullah, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah : Sebuah Pengantar Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta;LP3S, 1978), hal.2

¹³ Abdurrahman Surjomihardjo, "Menulis Riwayat Hidup", *Dalam Pemikiran Biografi dan Kesejahteraan: Suatu Kumpulan Prasarana Pada Berbagai Lokalkarya* (Jakarta: Debdikbud, 1983), hal.71

politik pada suprastuktur politik sebagai bupati Dharmasraya. Kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastuktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan) dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).¹⁴

Politik itu sendiri merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan dari tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya.¹⁵ Sedangkan kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastuktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan) dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan).¹⁶ Kepemimpinan politik Adi Gunawan tidak lepas dari usahanya dalam memenangkan pilkada pada tahun 2010 sehingga ia dapat memegang jabatan politis yaitu sebagai kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010-2015.

Kepemimpinan Adi Gunawan dijalankan berdasarkan otoritas legal-formal kekuasaannya berdasarkan kepada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Dengan kata lain, kekuasaan legal-formal adalah kekuasaan yang sah berdasar peraturan yang ada di tempat ia memiliki posisi tersebut. Orang-orang tunduk dan patuh karena posisi sosial yang dimiliki itu didefinisikan menurut peraturan sebagai yang harus patuh dan tunduk bukan karena orang yang menduduki posisi tersebut.¹⁷

¹⁴ Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm.12

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 8

¹⁶ Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm.12

¹⁷ Juhaya S. Pradja, *Teori-Teori Politik* (Pustaka Setia, 2013) hlm. 55

Kepemimpinan yang berdasarkan otoritas legal-formal menjadikan kepemimpinan Adi Gunawan memiliki batasan dalam menjalankan kepemimpinannya. Dengan demikian untuk melanjutkan kembali kepemimpinannya yang sedang ia jalankan untuk kali kedua maka diperlukan untuk melakukan proses yang sama saat ia memperoleh otoritasnya sebelumnya yaitunya melalui pilkada. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung, oleh karena itu dalam pilkada setiap kandidat harus dapat meyakinkan masyarakat untuk dapat mempercayakan seorang kandidat untuk dipilih sebagai pemimpin.

Dalam memilih pemimpin dalam pemilihan umum sistem pemilihan umum terkait erat dengan perilaku memilih. Perilaku memilih ini digunakan untuk menjelaskan mengapa para pemilih memilih salah satu kandidat daripada kandidat yang lain. Teori yang digunakan untuk memahami perilaku memilih ini diantaranya ialah *sociological model*, *rational choice model* dan *psychological model*.¹⁸

Pendekatan sosiologis percaya bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakter dan latar belakang sosiologisnya seperti kedaerahan, etnisitas, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan ras. Pendekatan *rational choice* merupakan pendekatan yang diadaptasi dari ilmu ekonomi yaitu pemilih bertindak rasional dengan kandidat yang dianggap mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya atau menekan kerugian sekecil-kecilnya. Pendekatan ini percaya bahwa pemilih akan memilih kandidat jika kinerja pemerintah mendatangkan

¹⁸ Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik* (Graha Ilmu, 2012) hlm. 90

perbaikan ekonomi ditingkat keluarga dan masyarakat. Sebaliknya pemilih akan beralih ke kandidat oposisi jika pemerintah gagal dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan psikologis dimana pendekatan ini lahir dari kritikan bahwa asumsi pemilih yang punya daya sosial ekonomi lebih baik dan berada dalam suatu jaringan sosial belum tentu berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak tertarik atau tidak punya ikatan psikologis dengan kandidat tertentu. Faktor psikologis ini terdiri dari tiga hal yaitu indentifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi isu kampanye. Aplikasi pendekatan ini dalam pemilu, pemilih yang telah mengidentifikasi dirinya dengan partai tertentu akan memilih kandidat yang diusung oleh partai tersebut. pemilih akan memilih kandidat yang memiliki karakter personal baik kemudian pemilih akan memilih kandidat yan menawarkan isu kampanye yang sesuai dengan kebutuhan pemilih.¹⁹

E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. metode sejarah adalah seperangkat kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.²⁰ Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa

¹⁹ *Ibid.*, hlm.91

²⁰ Gilbert J. Graghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1984), hlm 54-57.

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan.²¹

Metode berarti suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan secara efektif dan efisien. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.²² Metode penelitian sejarah memiliki empat tahap kegiatan yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi dan historiografi.

Heuristik, yaitu proses pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, berupa dokumen-dokumen tertulis maupun lisan dari peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Sumber primer diperoleh melalui penelusuran terhadap beberapa dokumen yang tersimpan pada arsip pribadi milik Adi Gunawan seperti ijazah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, di Arsip Daerah untuk mencari dokumen mengenai pemerintahan seperti LKPJ LPPD dan Rekomendasi LKPJ dari DPRD, Perpustakaan Daerah, di KPU Dharmasraya seperti laporan pemilu dan biodata paslon, BPS, dan Sekeretariat Daerah. Kemudian wawancara dengan anggota keluarga, tokoh masyarakat, bawahan Adi Gunawan selama menjabat sebagai bupati juga tokoh masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dengan Adi Gunawan. Pada pengumpulan sumber sekunder ialah dengan mencari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sumber-sumber tersebut didapat melalui studi

²¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm 32.

²² Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Penerbit Ombak, 2012), hlm 27

pustaka dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

Setelah selesai dalam tahapan pengumpulan data maka akan masuk kepada tahapan kritik. Kritik adalah suatu usaha untuk mendapatkan jejak sumber yang benar dalam arti kata benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan penulisan sejarah yang disusun. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah didapat, diuji dan ditelaah sehingga sumber dapat dipastikan keotentitasnya dan kebenaran isi sumber tersebut.

Interpretasi merupakan tahap ketiga, Interpretasi berarti menafsirkan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau. Untuk mengungkapkan makna dan signifikansi dirinya fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah masih harus menyandarkan dirinya pada kekuatan informasi dari luar ialah dari peneliti atau sejarawan. Hubungan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah dengan peneliti atau sejarawan adalah hubungan asimetrik. Sejarawan berfungsi sebagai determinan terhadap makna sejarah yang diinterpretasikan dari fakta-fakta atau bukti sejarah. Pada tahap ini fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan dalam rangkaian kronologis, sehingga dapat alur yang sistematis.

Historiografi ialah tahap terakhir, Penulisan Sejarah (Historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi. Kalau penelitian sejarah bertugas merekonstruksi sejarah masa lampau, maka rekonstruksi itu hanya akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis. Historiografi merupakan langkah perumusan cerita sejarah ilmiah, disusun secara logis menurut kronologis dan sistematis yang jelas dan mudah dimengerti

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas dan terarahnya penulisan mengenai biografi ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang membahas keterangan yang bersifat umum serta tersusun secara sistematis yang menerangkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II membahas mengenai latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan dan aktivitas Adi Gunawan sebelum masuk ranah politik. Bab III membahas mengenai kiprah Adi Gunawan dalam ranah politik dan perjalanan karirnya menjadi Bupati Kabupaten Dharmasraya. Bab IV membahas mengenai kepemimpinan Adi Gunawan selama menjadi Bupati di Kabupaten Dharmasraya. BAB V membahas mengenai uraian kesimpulan tentang bahasan pada bab-bab yang telah dikaji sebelumnya.